

## **Keadilan Lingkungan pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat**

*Environmental Justice in the Pepe River area, Sangkrah Village,  
Reviewed Based on The Physical Quality of the Environment and  
Social Economy of the Community.*

**Hafizh Asfari**

Sekolah, Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Sebelas Maret  
E-mail: nchasanah69@gmail.com  
(\* coresponding author)

---

### **Abstract**

*Sustainable development activities in Indonesia have not been carried out optimally, thus allowing for social and economic conflicts between communities. The social and economic impact of conflict can lead to disharmony in interactions between communities. Environmental justice or discrimination in the environmental context is measured based on differences in environmental impacts perceived by the community and statistical evidence that shows differences. The results of a web search of the Surakarta government show that the data in the form of the condition of children dropping out of school because of financial issue reaches 7% and the poverty rate is 30%. In this study, an analysis of environmental justice was carried out on the people living in the Pepe riverbank area based on the physical environment and socio-cultural conditions of the community. In this study, a multidimensional approach was used. The physical condition of the environment is assessed based on the quality of water, soil, and air. Socio-economic conditions were assessed by means of interviews and filling out questionnaires. Based on the results of the overall research, environmental justice has not been felt optimally by the Sangkrah village community. Based on the results of the study, the values of pH, iron, and total coliform of water did not exceed the existing quality standards, but the COD obtained was quite high, namely 15.3 mg/L. The results of the air quality test, the values of NO<sub>2</sub> and O<sub>3</sub> are in accordance with the applicable quality standards, namely 2.87 and 0.47 µg/Nm<sup>3</sup> respectively. The last education average of Sangkrah village residents is high school level of 41%. The types of work for residents of Sangkrah village are 50% self-employed, 16.67% employees, 6.67% laborers, and 36.67% other jobs. The average income of the community is IDR 500,000 – IDR 2,000,000, and some have very low incomes and even have no income. The concept of environmental justice that is recommended for the Sangkrah village community is to build character and improve the quality of human resources, which can be done with various programs that have been carried out such as entrepreneurship training, Posyandu/immunization, 12 years' free education and improvement of facilities and public infrastructure.*

**Keywords:** *Environmental justice, physical quality of the environment, socio-economic and cultural community.*

### Abstrak

Kegiatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum berjalan secara maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya konflik secara sosial dan ekonomi antar masyarakat. Dampak konflik secara sosial serta ekonomi dapat menimbulkan ketidakharmonisan interaksi antar masyarakat. Keadilan lingkungan atau diskriminasi dalam konteks lingkungan hidup diukur berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan. Hasil penelusuran web pemerintah Surakarta menunjukkan data berupa kondisi anak putus sekolah mencapai 7% dan tingkat kemiskinan 30%. Pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai keadilan lingkungan pada masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai Pepe berdasarkan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan multidimensional. Kondisi fisik lingkungan dinilai berdasarkan kualitas air, tanah, dan udara. Kondisi sosial ekonomi dinilai dengan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh, keadilan lingkungan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat kelurahan Sangkrah. Hasil penelitian kualitas air, nilai pH, besi, dan total coliform tidak melebihi baku mutu yang ada namun COD yang didapatkan terbilang cukup tinggi yaitu 15,3 mg/L. Hasil uji kualitas udara, nilai NO<sub>2</sub> dan O<sub>3</sub> sesuai dengan baku mutu yang berlaku yaitu secara berturut-turut sebesar 2,87 dan 0,47 µg/Nm<sup>3</sup>. Rata-rata pendidikan terakhir warga kelurahan Sangkrah yaitu tingkat SMA sebesar 41%. Jenis pekerjaan warga kelurahan Sangkrah yaitu wiraswasta 50%, karyawan 16,67%, buruh 6,67%, serta pekerjaan lainnya 36,67%. Penghasilan rata-rata masyarakat yaitu sebesar Rp 500.000 – Rp 2.000.000, dan beberapa mempunyai penghasilan rendah bahkan ada pula yang tidak berpenghasilan. Konsep keadilan lingkungan yang disarankan untuk masyarakat kelurahan Sangkrah yaitu dengan pembentukan karakter dan peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu dapat dilakukan dengan berbagai program yang telah dijalankan seperti Balai Latihan Kerja, Usaha Menengah Kecil Masyarakat, posyandu/imunisasi, pendidikan gratis 12 tahun serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

**Kata kunci:** keadilan lingkungan, kualitas fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai pemikiran pembangunan yang menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan [1]. Model pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah terdiri dari tiga pilar yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi [2]. Kegiatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi obyek dari pembangunan. Faktor penyebab belum optimalnya pembangunan berkelanjutan yaitu hukum lingkungan yang tidak berjalan [3]. Ketidakefektifan hukum lingkungan di Indonesia mengakibatkan hanya beberapa kalangan yang dapat menikmati hasil pembangunan, yaitu beberapa masyarakat menengah ke atas. Hal tersebut memungkinkan terjadinya konflik secara sosial dan ekonomi antar masyarakat. Dampak konflik secara sosial serta ekonomi dapat menimbulkan ketidakharmonisan interaksi antar masyarakat, yaitu akan menyebabkan terjadinya kerusakan, kesenjangan ekonomi, serta ketidaklayakan hidup bagi masyarakat [4].

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang memberikan daya dukung optimal untuk kehidupan manusia dalam suatu wilayah [5].

Penilaian secara kuantitatif kualitas lingkungan hidup didasarkan pada tiga kriteria yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Hutan (IKTL), karena ketiga kriteria tersebut merupakan pokok keperluan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya [6]. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat memberikan pengaruh kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar apabila kualitas lingkungan hidup di sekitarnya tergolong dalam keadaan yang baik [7].

Gerakan keadilan lingkungan menjadi faktor kunci dalam perjuangan untuk menyediakan lingkungan yang sehat bagi semua orang untuk berkembang [8]. Keadilan lingkungan merupakan keadaan yang sama bagi semua generasi baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang [4]. Menurut Bullard (1994) [9], keadilan lingkungan mempunyai elemen dasar yaitu hak setiap individu dilindungi dari segala pencemaran, mitigasi pencemaran yang akan terjadi, dan beban pencemaran menjadi tanggung jawab oknum yang melakukan pencemaran. Ketidakadilan lingkungan biasanya dipahami sebagai keterpaparan yang tidak merata dari masyarakat minoritas berpenghasilan rendah terhadap risiko dan beban lingkungan yang biasanya terjadi pada skala lokal hingga regional [10]. Diskriminasi dalam konteks lingkungan hidup diukur berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dan bukti statistik, serta perbedaan pembagian resiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya target [9].

Hasil penelusuran web Pemerintah Surakarta berjudul Atlas Sangkrah menunjukkan data berupa kondisi anak putus sekolah mencapai 7%, tingkat kemiskinan 30%, 50% tidak memiliki WC pribadi, dan banyaknya penyakit yang diderita oleh masyarakat (diare, demam berdarah, dan ispa). Berdasarkan kondisi tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai keadilan lingkungan pada masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai kelurahan Sangkrah. Pendekatan secara multidimensional sangat diperlukan yaitu pendekatan secara menyeluruh kepada kehidupan masyarakat yang dianalisa dari sudut pandang lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pendekatan tersebut dapat membantu dalam menganalisa eksistensi keadilan lingkungan bagi masyarakat yang berada pada kehidupan yang kurang baik serta tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan program kebijakan yang telah berjalan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021 di Kelurahan Sangkrah Rt 1 Rw 3 (Kali Pepe). Pengukuran kualitas air, udara, dan tanah dilakukan di BBTKL Yogyakarta, Laboratorium DLH Sukoharjo, dan Laboratorium Ilmu Lingkungan UII Yogyakarta.

### **2.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat yang digunakan dalam menganalisa kualitas fisik lingkungan yaitu pH meter, timbangan analitik, erlenmeyer, spektrofotometer serapan atom (SSA), oven, dan tabung reaksi. Sedangkan alat yang akan digunakan dalam menganalisa keadilan lingkungan pada masyarakat yang menempati wilayah yaitu peralatan tulis, kamera, lembaran pertanyaan wawancara dan quisoner. Bahan penelitian yang digunakan dalam menganalisa kualitas fisik lingkungan yaitu formalin 4%, sampel air, sampel tanah, sampel udara ambient, larutan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ), larutan kalium antimonil tartrat ( $K(SbO)C_6H_4O_6 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ ), NaCl,  $KMnO_4$ ,  $MgSO_4$ ,  $MnSO_4$ ,  $HgSO_4$ ,  $CaCl_2$ ,  $FeCl_3$ , KI, larutan penyangga, sedangkan dalam menganalisa keadilan lingkungan bagi masyarakat maka sampel yang akan diteliti yaitu Masyarakat Kelurahan Sangkrah.

### 2.3 Cara kerja

Analisa fisik mencakup pengujian kualitas air yaitu melakukan pengukuran pH air menggunakan alat pH meter. Selanjutnya pengujian COD dilakukan dengan metode refluks. Pengujian Fe dibedakan menjadi dua macam yaitu pengujian  $Fe^{2+}$  dan  $Fe^{3+}$ . Pengujian kedua Fe tersebut dilakukan secara kualitatif. Pengujian Total *Coliform* dilakukan dengan metode Angka Paling Mungkin (APM). Metode ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu Uji Praduga dan Uji Konfirmasi.

Pengujian kualitas udara antara lain mencakup pengujian Nitrogen Oksida ( $NO_2$ ), dilakukan dengan alat sampling udara LLHD yaitu ambient air sampler. Selanjutnya,  $NO_2$  diuji dengan metode *Griess-Salzman* menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya pengujian Ozon dilakukan dengan metode neutral buffer kalium ionida (NBKI) menggunakan spektrofotometer.

Pengujian kualitas tanah antara lain yaitu penetapan pH tanah, nilai pH menunjukkan konsentrasi ion  $H^+$  dalam larutan tanah, yang dinyatakan sebagai  $-\log [H^+]$ . Penetapan ketersediaan Fe, Mn, Cu, dan Zn ekstrak DTPA pengekstrak DTPA (dietilene triamine penta acetic acid) dapat melarutkan ion-ion logam dalam bentuk senyawa khelat.

Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat, keadilan lingkungan serta kebijakan pemerintah, dilakukan di masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Pepe menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner.

### 2.4 Analisa Data

Analisis mengenai keadilan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah Sangkrah (Kali Pepe) dilakukan dengan beberapa indikator yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Indikator tersebut diantaranya kualitas lingkungan, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan respon masyarakat mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Penentuan kualitas lingkungan dilakukan dengan pengukuran kualitas air, udara, dan tanah sedangkan keadaan sosialekonomi dan respon masyarakat terkait dengan kebijakan dilakukan dengan proses wawancara dan pengisian kuisioner. Dalam menentukan koresponden yang akan diminta wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan dengan Purposive Sampling yang berarti bahwa koresponden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan mewakili populasi yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kualitas Lingkungan Fisik Kelurahan Sangkrah

Kualitas fisik lingkungan merupakan kondisi secara fisik suatu lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kehidupan masyarakat. Fisik lingkungan biasanya terdiri dari tiga elemen yaitu air, tanah, dan udara [5]. Kualitas fisik lingkungan pada kelurahan Sangkrah, Surakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perubahan terjadi diakibatkan banyaknya aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya pencemaran baik air, udara, maupun tanah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara masyarakat RT 1 RW 3 kelurahan Sangkrah, terdapat dua sumber air yang digunakan untuk keperluan hajat yaitu PDAM dan Sumur. Masyarakat yang menggunakan PDAM sekitar 76.67 % sedangkan sumur 23.3%.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas air kedua sumber di Kelurahan Sangkrah dapat dikatakan berada dalam kategori yang baik (Tabel 1 dan 2). Beberapa indikator seperti pH, besi, dan total coliform tidak melebihi baku mutu yang ada sedangkan indikator COD tidak ada baku mutu dalam Permenkes No 32 Tahun 2017. Namun hasil COD yang didapatkan terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan PP No 82 Tahun 2001 yaitu 10 mg/L.

Tingginya nilai COD menggambarkan air tersebut terindikasi memiliki bahan pencemar sehingga air tersebut harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal tersebut diperkirakan karena jarak pemukiman yang terlalu dekat dengan sungai yaitu hanya berjarak ±6 meter. Selain itu, sebagian besar warga yang tidak memiliki septitank sehingga hasil limbah rumah tangga langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui pengolahan limbah. Persentase masyarakat yang membuang ke sungai yaitu 83.33% sisanya 16.67% dibuang ke tempat penampungan tertutup di perkarangan.

Tabel 1. Kualitas Air Sumur Kelurahan Sangkrah

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu Permenkes No.
A. Parameter Kimiawi				
1.	pH	-	8	6.5-8.5
2.	Besi	mg/L	<0.02	1
3.	COD	mg/L	<15.3	-
B. Parameter Biologi				
1.	Total Coliform	CFU/10	27	50

Tabel 2. Kualitas air PDAM kelurahan Sangkrah

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu Permenkes No.32 Tahun 2017
A. Parameter Kimiawi				
1.	pH	-	7.58	6.5-8.5
2.	Besi	mg/L	<0.02	1
3.	COD	mg/L	<15.3	-
B. Parameter Biologi				
1.	Total Coliform	CFU/100	47	50

Kualitas udara adalah kadar kandungan udara berdasarkan konsentrasi polutan di lokasi tertentu sedangkan indeks kualitas udara ialah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indikator dalam menilai kualitas udara dapat diukur dengan berbagai parameter pencemaran udara seperti NO<sub>2</sub> dan O<sub>3</sub>. Berdasarkan hasil uji kualitas udara di kelurahan Sangkrah, diperoleh hasil udara dalam keadaan yang sehat, hal itu dapat dilihat dari dua indikator NO<sub>2</sub> dan O<sub>3</sub> sesuai dengan baku mutu yang berlaku (Tabel 3). Ada beberapa hal yang menyebabkan udara di sekitar kelurahan sangkrah masih bagus seperti tidak adanya sampah yang berserakan, masih banyaknya tanaman diperkarangan rumah, dan jarangya industri di sekitar kelurahan.

Tabel 3. Kualitas Udara Kelurahan Sangkrah

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku MutuPP No 22 Tahun 2021	Waktu Pengukuran
1.	Oksidan(O <sub>3</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	2.87	150	1 Jam
2.	NitrogenOksida(NO <sub>2</sub> )	µg/Nm <sup>3</sup>	0.47	200	1 Jam

Kualitas tanah menjadi kapasitas spesifik suatu tanah untuk berfungsi secara alami atau dalam batasan-batasan ekosistem yang terkelola untuk menompang produktivitas

hewan dan tumbuhan, memelihara atau meningkatkan kualitas udara dan air, serta mendukung tempat tinggal dan kesehatan manusia. Indeks kualitas tanah merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai dan bobot tiap indicator kualitas tanah. Berdasarkan hasil uji kualitas tanah di kelurahan Sangkrah, diperoleh hasil secara kimia yaitu pH tanah didapatkan bahwa kondisi pH berada dalam keadaan yang normal yaitu 7 (Tabel 4). Kondisi pH yang normal memberikan keadaan yang nyaman bagi organisme tanah dalam berperan penyuburan tanah. Selain itu, pH yang berada pada kondisi yang normal menggambarkan air tanah di wilayah tersebut tidak terdapat bahan pencemar. Dalam analisa unsur logam yang ada pada tanah seperti Zn, Mn, Cu, dan Fe berada pada kategori normal yaitu tidak melebihi baku mutu yang berlaku. Sedikitnya kandungan logam pada tanah disebabkan karena curah hujan pada bulan September berada pada kategori tinggi yaitu rata-rata 61 mm dengan kelembaban udara rata-rata 70%. Curah hujan dan kelembaban tinggi akan berdampak pada suhu tanah dan kelembaban tanah juga tinggi. Kondisi ini berdampak pada kandungan bahan organik tanah juga meningkat. Kandungan logam yang normal atau unsur hara mikro membuat tanaman dapat melakukan tumbuh dan berkembang secara sempurna pada daerah tersebut.

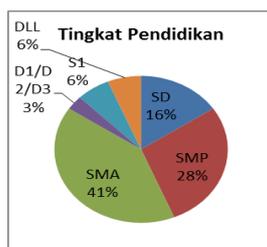
Tabel 4. Kualitas Tanah Kelurahan Sangkrah

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji
1.	Seng (Zn)	mg/Kg	347 ± 14.8
2.	Mangan (Mn)	mg/Kg	723 ± 13.5
3.	Tembaga (Cu)	mg/Kg	36.9 ± 1.36
4.	Besi (Fe)	mg/Kg	3967 ± 60.8
5.	Ph	-	7.20

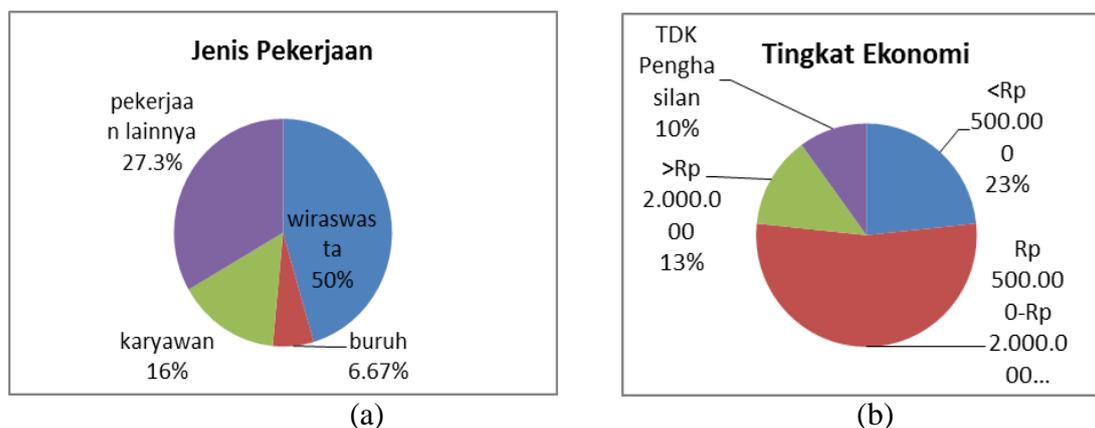
Kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan tingkat ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat memberikan pengaruh kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar apabila kualitas lingkungan hidup di sekitarnya tergolong dalam keadaan yang baik [7]. Selain pemerintah, masyarakat juga menentukan kualitas lingkungan hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepedulian lingkungan bagi masyarakat seperti ilmu pengetahuan lingkungan yang rendah, kenyamanan lingkungan yang ada, tingkat pendidikan yang rendah, status ekonomi yang kurang, dan sebagainya. Ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat diatasi dengan pendidikan etika lingkungan [11].

### 3.2 Kualitas Sosial Ekonomi Kelurahan Sangkrah

Berdasarkan hasil wawancara koresponden di kelurahan Sangkrah yang diikuti sekitar 30 KK (kepala keluarga), persentase jenis kelamin laki-laki sebesar 56.67% sedangkan perempuan 43.33%. Rentang umur koresponden yaitu 25-70 tahun. Mayoritas pendidikan terakhir warga kelurahan Sangkrah yaitu di tingkat SMA dengan persentase sebesar 41%. Warga dengan pendidikan terakhir di tingkat SD yaitu sebesar 16%, di tingkat SMP sebesar 28%, D1/D2/D3 sebesar 3%, serta warga dengan pendidikan terakhir di tingkat S1 sebesar 6%, sedangkan 6% warga tidak memperoleh pendidikan formal.

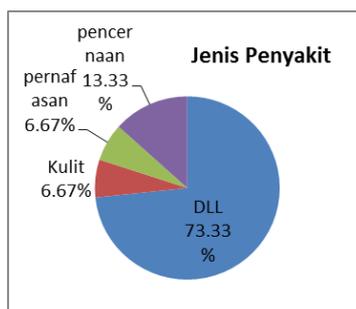


Gambar 1. Tingkat Pendidikan Warga Sangkrah



Gambar 2. (a) jenis pekerjaan warga Sangkrah (b) tingkat ekonomi warga Sangkrah

Jenis pekerjaan warga kelurahan Sangkrah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai berikut wiraswasta 50%, karyawan 16.67%, buruh 6.67%, serta pekerjaan lainnya 36.67% (Gambar 2a). Penghasilan yang didapatkan berbeda-beda untuk setiap warga, beberapa mendapatkan hasil harian sedangkan lainnya secara bulanan bahkan ada yang tidak mendapatkan keduanya. Warga yang mendapatkan penghasilan secara harian sekitar 63.33%, bulanan 26.67%, serta yang tidak mendapatkan keduanya 10%. Jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh 30 warga yaitu pendapatan kurang dari Rp 500.000 yaitu sekitar 23.33%, Rp 500.000 – 2.000.000 (53.33%), > Rp 2.000.000 (13.33%), serta persentase warga yang tidak memiliki penghasilan sebesar 10% (Gambar 2b).



Gambar 3. Jenis Penyakit Warga Sangkrah

Analisa hasil wawancara selanjutnya didapatkan bahwa setiap koresponden memiliki kepemilikan rumah pribadi dengan kondisi rumah permanen. Selanjutnya, fasilitas kesehatan yang terdapat pada kelurahan Sangkrah yaitu puskesmas induk/pusat. Puskesmas tersebut melayani berbagai program kesehatan dari pemerintah seperti imunisasi, posyandu, dan sebagainya. Hampir semua warga memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS/KIS. Sebanyak 80% warga, biaya jaminan kesehatannya ditanggung oleh subsidi pemerintah, sedangkan 20% warga biaya mandiri. Kondisi kesehatan masyarakat Sangkrah tergolong baik. Adapun penyakit yang sering terjadi yaitu masuk angin dengan persentase 66.67%, disusul dengan penyakit lain seperti pernafasan 6.67%, kulit 6.67%, dan pencernaan 13.33% (Gambar 3).

Dilihat dari penghasilan rata-rata masyarakat sekitar bantaran Sungai Pepe, Kelurahan Sangkrah, yaitu sebesar Rp 500.000 – Rp 2.000.000, dan sebagian masyarakat memiliki penghasilan diatas Rp 2.000.000, namun masih ada warga yang berpenghasilan sangat rendah bahkan tidak berpenghasilan. Rata-rata penghasilan warga Sangkrah memang terbilang cukup untuk sehari-hari karena biaya hidup di Kota Surakarta tergolong murah. Kehidupan masyarakat kelurahan Sangkrah dapat dikatakan cukup layak dinilai dari kemampuan membiayai untuk sandang, pangan, dan papan. Kehidupan cukup layak dapat digambarkan dengan kepemilikan rumah pribadi untuk setiap masyarakat dengan keadaan yang permanen, sirkulasi udara yang bersih, keberadaan fasilitas hiburan seperti tv dan memiliki kendaraan pribadi. Namun, kondisi tersebut belum 100% dialami oleh seluruh warga di kelurahan Sangkrah dilihat dari hasil analisis tingkat pendapatan warga.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Kondisi sosial ekonomi menunjukkan posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya [12]. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh suatu masyarakat dalam wilayah. Kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan yang bersifat absolute dan relative. Kemiskinan yang bersifat absolute adalah kemiskinan yang didasarkan pada ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan yang bersifat relative merupakan kemiskinan yang disebabkan dari dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat [13]. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kondisi keterisolasian [14].

### **3.3 Keadilan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sangkrah**

Menurut pendapat Collin sebagaimana dikutip oleh Wibisana (2017) [15] keadilan lingkungan merupakan suatu konsep yang memuat aspek distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil di antara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuisioner warga, serta hasil analisis terkait kondisi fisik lingkungan dan sosial ekonomi warga RT 1 RW 3 Kelurahan Sangkrah memberikan fakta bahwa keadilan lingkungan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan keadilan pada beberapa aspek, terutama pada fasilitas publik dan kualitas sumber daya manusia.

Mayoritas warga di Kelurahan Sangkrah tidak memiliki fasilitas septitank, sehingga limbah MCK langsung dialirkan ke Kali Pepe. Kondisi demikian mengakibatkan peningkatan pencemaran air, tanah dan udara yang selanjutnya dimungkinkan akan muncul permasalahan kesehatan bagi warga sekitar. Menurut data BPS tahun 2020 Kecamatan Pasar Kliwon [16] menyebutkan bahwa Kelurahan Sangkrah hanya memiliki dua fasilitas kesehatan berupa satu puskesmas tanpa rawat inap dan satu apotek. Jumlah ini tentu sangat kurang sebab cukup banyak masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian pembangunan fasilitas MCK dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan lingkungan.

Selain itu, fasilitas berupa ruang terbuka hijau dan ruang bermain bagi anak-anak juga belum tersedia di wilayah Kelurahan Sangkrah. Ruang terbuka hijau secara langsung dapat meningkatkan kualitas udara, lebih lanjut ruang terbuka hijau juga membantu keberlanjutan secara ekologis baik kondisi air maupun tanah di wilayah bantaran sungai. Pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga juga termasuk dalam salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan di Kelurahan Sangkrah, sebab sebagian warga masih membuang sampah rumah

tangga ke sungai. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak besar kedepannya, baik kesehatan maupun ekologis. Berdasarkan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2017 [17], kelurahan Sangkrah tergolong dalam daerah rawan banjir, dan tercatat pernah mengalami banjir pada tahun 2018. Pengawasan dan kesadaran diri terhadap pengelolaan sampah dirasa kurang, sehingga perlu adanya keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif. Keadilan korektif merupakan keadilan yang diarahkan pada upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain [15].

Ditinjau dari sudut pandang sosial dan ekonomi salah satu yang menjadi permasalahan adalah kesenjangan sosial antarwarga terkait dengan status ekonomi. Status ekonomi yang senjang membentuk beberapa kelompok warga antara satu dengan kelompok warga lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menjadikan anggotanya diprioritaskan dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah sehingga bantuan maupun program yang dirancang pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tidak tepat sasaran. Keadaan ini perlu perhatian khusus dan peran serta pemerintah agar program pemerintah dapat tersalurkan sesuai dengan sasaran. Berdasarkan data BPS tahun 2020 Kecamatan Pasar Kliwon, jumlah penduduk miskin pada kelurahan Sangkrah sebanyak 250 rumah tangga dengan 813 anggota keluarga. Angka tersebut tergolong cukup tinggi. Pada daerah tersebut juga dilaporkan terdapat 6 anak terlantar dan sebanyak 987 kepala keluarga menerima bantuan pemerintah.

Di wilayah Kelurahan Sangkrah juga tidak memiliki pabrik yang beroperasi. Berdasarkan data jumlah warga yang belum bekerja adalah sebanyak 2.090 jiwa (BPS, 2020) [16] dan sebagian warga banyak bergantung pada pekerjaan wiraswasta. Kurangnya *softskill* dan *hardskill* yang dimiliki warga sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan masyarakat lain dalam memperoleh pekerjaan. Kondisi keuangan para wiraswasta pun tidak selamanya baik, bahkan sangat bergantung pada konsumen yang membeli barang usahanya. Para wiraswasta mengeluhkan kurangnya pemasukan terlebih pada kondisi pandemi saat ini. Pemerintah telah mengadakan program untuk membantu warga dalam mengembangkan usahanya melalui UMKM dan meningkatkan keterampilan kerja melalui program BLK. Akan tetapi, banyak warga yang belum mengerti dan tidak turut serta dalam program tersebut. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat menjadikan faktor utamanya, sehingga diperlukan perantara yang baik dari pemerintah kepada masyarakat agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Peningkatan pendidikan juga sangat diperlukan bagi warga Kelurahan Sangkrah, sebab berdasarkan data dari BPS Kota Surakarta tahun 2020 [17], dari jenjang SD-SMA fasilitas sekolah di kelurahan Sangkrah hanya terdapat tiga Sekolah Dasar Negeri. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan wajib bagi warga masyarakat sehingga diperlukan pembangunan fasilitas pendidikan agar dapat dijangkau oleh warga kelurahan Sangkrah serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing.

### **3.4 Konsep Keadilan Lingkungan bagi Masyarakat Kelurahan Sangkrah**

Keadilan lingkungan adalah gerakan sosial, dan lensa teoretis, yang berfokus pada keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, dan dalam proses yang menentukan distribusi tersebut. Artinya, hal ini berkaitan dengan baik “perlakuan adil” dan “keterlibatan signifikan” masyarakat miskin, ras dan masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan dan keputusan pengembangan sumber daya alam yang biasanya mengakibatkan masyarakat tersebut menanggung lebih banyak dari kerusakan lingkungan [18]. Keadilan lingkungan, menurut pendapat Kuehn (2000) [19] menyebutkan bahwa keadilan lingkungan dibagi menjadi empat prinsip yaitu keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dihadapkan pada kondisi di wilayah Kelurahan

Sangkrah, keadilan lingkungan dapat ditinjau melalui prinsip keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Lebih lanjut, Purwendah (2019) [3] menjelaskan bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial menginginkan adanya alternatif sistem ekonomi yang memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, pemulihan lingkungan baik desa maupun perkotaan, menyediakan akses yang mudah bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki, memajukan kebijakan berdasarkan saling menghormati serta mendukung kebebasan masyarakat secara politik, ekonomi dan budaya. Masyarakat dan lingkungan (ekologis) tidak dapat dipisahkan, justru keduanya berkaitan dan saling mempengaruhi. Masyarakat yang meninggalkan prinsip ekologis harus ditata ulang sejalan dengan prinsip ekologis untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.

Ditinjau dari fasilitas publik yang digunakan seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang berjumlah sangat kurang, warga Kelurahan Sangkrah masih membutuhkan fasilitas yang dapat memberikan akses mudah bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas fasilitas public tersebut. Selain itu dari sisi ekologis-sosial, sebagian warga Kelurahan Sangkrah belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dengan tidak mengalirkan ataupun membuang limbah MCK dan rumah tangga ke aliran Sungai Pepe. Hal ini tentu saja akan sangat berdampak pada aspek yang lain.

Setiap individu masyarakat memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada [12]. Sebagian warga Kelurahan Sangkrah mengeluhkan keadaan perekonomian yang mengalami penurunan akibat pandemi. Tidak sedikit pula, warga yang tidak bekerja akibat kurangnya keterampilan kerja.

Konsep keadilan lingkungan bagi masyarakat kelurahan Sangkrah baiknya harus ditekankan dalam hal pembentukan karakter dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Dengan demikian, setiap warga dapat memiliki pemahaman yang baik dalam hal menjaga kesehatan lingkungan fisik serta memiliki bekal yang cukup untuk mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih optimal. Peningkatan mutu dan pembentukan karakter sumber daya manusia dapat dilakukan oleh beberapa program yang telah dijalankan pemerintah seperti BLK (Balai Latihan Kerja), pendidikan gratis 12 tahun bagi anak-anak, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), sosialisasi mengenai etika lingkungan, pelayanan kesehatan secara keliling dan mobil perpustakaan keliling.

Dalam hal program BLK dan UMKM, masyarakat banyak yang mengeluh tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah terkait itu. BLK dan UMKM sangat diperlukan masyarakat terutama dalam persaingan mendapatkan pekerjaan dalam kondisi seperti ini, yang mana tujuan dari program itu membuat masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan ataupun meningkatkan *soft skill* yang dimilikinya. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah pusat ataupun setempat menjadikan masyarakat terhimpit dalam ekonomi yang tidak pasti terutama pada generasi yang akan datang. Selain sosialisasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan *soft skill* maka masyarakat juga mengeluhkan permodalan dalam usahanya.

Bantuan modal sebenarnya sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya masyarakat mendapatkannya, bantuan itu dirasa kurang tepat sasaran. Apabila kedua program tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat akan mendapatkan keadilan terutama dalam sudut pandang ekonomi. Selanjutnya, terkait dengan permasalahan pendidikan maka program pendidikan gratis

12 tahun harus ditingkatkan dalam sarana dan prasarana sekolah. Pembangunan sekolah di wilayah tersebut harus dilakukan kembali karena banyak warga yang mengeluhkan jauhnya jarak sekolah dari rumahnya. Kondisi itu mengakibatkan beberapa anak dari warga yang

melakukan wawancara putus sekolah. Selain itu, kurangnya wawasan ilmu pengetahuan baik itu alam dan social bagi generasi mendatang dirasakan pula oleh anak-anak yang ada pada wilayah itu. Perlunya penggalakan kembali program mobil perpustakaan keliling untuk kelurahan Sangkrah, mobil perpustakaan keliling nantinya dapat membantu masyarakat baik itu anak-anak maupun orang dewasa dalam meningkatkan wawasan dan membangun karakter yang dimilikinya. Mobil perpustakaan keliling nantinya dapat beroperasi dalam seminggu dua sampai tiga kali. Dalam hal pelayanan masyarakat maka diperlukan pelayanan kesehatan keliling bagi masyarakat, jarak dan jumlah pelayanan yang sedikit membuat kesehatan masyarakat tidak terkontrol terutama usia 50- 70 tahun.

Program pelayanan kesehatan keliling sangat dibutuhkan untuk memeriksa keadaan kesehatan juga memberikan edukasi kepada generasi mendatang terutama dalam hal reproduksi sehat ataupun keluarga berencana. Setelah itu, mengenai lingkungan maka masyarakat harus diberi arahan mengenai etika lingkungan. Pemberian materi kepada masyarakat akan memperkaya mereka terkait dengan kebersihan lingkungan ataupun keselamatan bencana alam atau buatan. Etika lingkungan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya sosialisasi nantinya lingkungan akan semakin bersih dan rapi. Kebersihan dan kerapian lingkungan akan tercapai jika memahami cara menjaga lingkungan dan adaptasi lingkungan yang sehat.

#### **4. KESIMPULAN**

Lingkungan fisik pada wilayah kelurahan Sangkrah memiliki kondisi yang tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator air, udara, dan tanah yang tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Akan tetapi diperlukan kerjasama lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat setempat terutama dalam mengatasi permasalahan sampah dan pembuangan limbah rumah tangga.

Keadilan lingkungan belum secara maksimal dapat dinikmati, terutama berkaitan dengan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Dalam hal ekonomi masyarakat sangat memerlukan suntikan modal untuk usahanya. Dari sudut pandang sosial dan kesehatan diperlukan peningkatan sarana dan prasarana agar kesehatan dapat terjaga serta pemberian pendampingan dan penyuluhan terkait dengan kesehatan lingkungan.

Konsep keadilan lingkungan yang disarankan untuk masyarakat kelurahan Sangkrah yaitu dengan pembentukan karakter dan peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu dapat dilakukan dengan berbagai program yang telah dijalankan seperti Balai Latihan Kerja, Usaha Menengah Kecil Masyarakat, posyandu/imunisasi, pendidikan gratis 12 tahun serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Kelola*, vol. 1, no. 1, 2018.
- [2] M. Zaini dan T.D. Agus, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda," *JIEP*, vol. 15, no. 2, 2015.
- [3] E.K. Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realisme," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 5, no.2, 2019.
- [4] Solikatur, Supono, dan M. Yulia, "Kemiskinan dalam Pembangunan". *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 3, no.1, pp. 70-90, 2014.
- [5] A.S. Suryani, "Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- di Provinsi Banten,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 9, no. 1, 2018.
- [6] S.N. Qodriyatun, “Konsensi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi,” *Aspirasi*, vol. 7, no.1, 2016.
- [7] D. Uzzel, “Environment and Quality of Life. *Elsevier*, vol. 56, pp. 1-4, 2006
- [8] S.S. Clark and M.L. Miles, “Assessing the Integration of Environmental Justice and Sustainability in Practice: A Review of the Literature,” *Sustainability*, vol. 13, pp. 11238, 2021.
- [9] D.R. Bullard, *Environmental Justice for All*. Club Books. San Fransisco, 1994.
- [10] L.A. Teron, “Language of (in) justice: Expanding the sustainability planning lexicon,” *Environ. Justice*, vol. 8, pp. 221–226, 2015.
- [11] E. Brooks and D. Simin, “Litter and Social Practices”. *Journal of Litter and Environmental Quality*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [12] S. Huzaimah, “Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta”. *Islamic Management and Empowerment Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 81-92, 2020
- [13] R. Cahyadi, “Kaum Miskin Kota, Sampah, dan Rumah; Studi Tentang Akses Migran Miskin Terhadap Sumber Daya Lingkungan dan Perumahan di Tangerang”. *Jurnal Sosiologi*, vol. 16, no.1, pp. 77-91, 2011
- [14] N. Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, vol. 10, no.1, pp. 1-11, 2018
- [15] A.G. Wibisana, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan,” *Mimbar Hukum*, vol. 29, no. 2, 2017.
- [16] Badan Pusat Statistik (BPS), “Kecamatan Pasar Kliwon dalam Angka 2020,” BPS Kota Surakarta. Surakarta. 2020.
- [17] Anonim, “Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta”, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Surakarta, 2017.
- [18] D.N. Scott, “What is Environmental Justice?”. *Osgoode Legal Studies Research Paper Series 4*, vol. 10, no. 16, 2014.
- [19] R.R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice,” *Environmental Law Reporter*, vol.30, 2000.